

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi ini adalah “Efektivitas Diplomasi Publik dalam Menampilkan Wajah Indonesia yang Moderat, Demokratis, dan Moderat”. Ada beberapa alasan yang akan diungkapkan mengenai pemilihan judul tersebut. Pertama, sejauh pengamatan penulis, belum ada skripsi maupun karya kepustakaan lain yang fokus terhadap topik tersebut. Walaupun banyak karya ilmiah yang mengambil topik diplomasi modern di era globalisasi, tapi belum ada yang memfokuskan diri terhadap diplomasi publik Indonesia.

Kedua, diplomasi publik merupakan salah satu hasil dari perkembangan diplomasi modern yang lebih menekankan pada *soft power diplomacy* yang tidak menggunakan kekuatan militer sebagaimana *hard power diplomacy* melainkan lebih kepada hegemoni. Dalam diplomasi publik, esensi dan tujuan dari hegemoni yaitu untuk mempengaruhi bahkan membujuk publik dalam negeri maupun luar negeri melalui informasi, kebudayaan, dan pendidikan sebagai instrumen utamanya. Dengan kata lain, diplomasi publik digunakan untuk memperbaiki ataupun membangun citra yang baik. Ada beberapa skripsi dan karya kepustakaan yang menjadikan citra Indonesia sebagai pembahasan utama, namun sejauh pengamatan penulis, skripsi dan karya kepustakaan tersebut menggunakan pendekatan pariwisata maupun diplomasi budaya dalam menjelaskan permasalahan. Sedangkan skripsi ini membahas citra Indonesia melalui pendekatan diplomasi publik.

Ketiga, membangun citra Indonesia yang demokratis, moderat, dan progresif melalui diplomasi publik bukanlah hal yang mudah dan murah. Upaya diplomasi publik dalam membangun citra Indonesia dengan menonjolkan keunikan serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki, telah menarik perhatian saya untuk menelitinya di tengah persaingan ketat diantara banyak negara dalam merebut perhatian publik dunia.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami berbagai peristiwa yang berdampak terhadap citra Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan diplomasi publik, khususnya untuk membangun kembali citra Indonesia
3. Untuk membuktikan kebenaran hipotesa yang didukung dengan kerangka dasar pemikiran, serta data dan fakta yang ada.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berbeda dan unik di bandingkan dengan negara lain dimana berbagai identitas dan budaya tradisional hidup berdampingan membentuk identitas nasional tanpa melebur identitas tradisional itu sendiri. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, lebih dari 500 suku dan 700 dialek yang digunakan oleh lebih dari 240 juta penduduk di 33 propinsi.

Dalam forum internasional, saat ini Indonesia di kenal sebagai negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, serta sebagai negara

dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Akibat perkembangan dan perubahan dunia secara signifikan, Indonesia menghadapi isu-isu; mengurangi kemiskinan, peningkatan pendidikan, mencegah terorisme, mengkonsolidasikan demokrasi setelah empat dekade berada di bawah otoritarisme, mengimplementasikan reformasi ekonomi dan finansial, mengatasi korupsi, membantu militer dan kepolisian bertanggungjawab terhadap kekerasan HAM, menghadapi perubahan iklim, dan mengontrol SARS.¹

Banyaknya isu yang harus dihadapi menimbulkan spekulasi bahwa suatu negara sedang berada dalam masalah. Perkembangan dari upaya Indonesia menghadapi isu-isu ataupun penyelesaian masalah tersebut membawa pada usaha menampilkan citra (*images*) positif kepada publik di dalam dan diluar negeri.

Dalam kajian politik internasional, citra merupakan kepentingan nasional yang penting selain keamanan, kemakmuran ekonomi, dan promosi ideologi. Karena, citra nasional suatu bangsa akan mempengaruhi sikap negara lain. Pencapaian citra yang positif, tak lain untuk membentuk opini publik demi pencapaian kepentingan nasional yang lebih luas.

Peran opini publik dalam hubungan internasional sangat kompleks, kadang sangat berlawanan dan sulit untuk di prediksi. Namun, kekuatan opini publik terletak pada pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Dengan semakin demokratisnya proses pembuatan kebijakan di beberapa negara, menjadikan pengaruh opini publik semakin meningkat.

¹ www.worldfactbook.com/indonesia

Diplomasi publik merupakan sarana yang tepat untuk merebut opini publik dengan mempromosikan citra negara. Hal ini dikarenakan diplomasi publik tidak seperti diplomasi konvensional yang menekankan pada penggunaan kekuatan ekonomi dan militer sebagai instrumen utamanya, melainkan lebih kepada hegemoni² melalui informasi, kebudayaan dan pendidikan. Proses pembentukan citra dan persepsi menjadi hal yang sangat penting karena, “*winning hearts and minds*” menjadi esensi dan tujuan dari diplomasi publik.³

Diplomasi publik bukanlah hal yang baru dalam politik internasional Indonesia. Karena perkembangan dan tantangan internasional, termasuk globalisasi, demokrasi, dan isu-isu kontemporer lain, Indonesia merasa perlu untuk lebih mengembangkan diplomasi publik. Pada tahun 2002, Departemen Luar Negeri membentuk Direktorat Diplomasi Publik yang diarahkan pada menampilkan wajah Indonesia yang moderat, demokratis, dan progresif, serta membangun konstituen diplomasi dengan bekerjasama dan merangkul semua pemangku kepentingan hubungan luar negeri.⁴

Dalam hal ini, moderat merujuk pada masyarakat Indonesia yang pluralistik dan toleran serta, 86% nya adalah Muslim. Selain itu, berbagai ekspresi seni budaya tradisional dan kontemporer juga dapat hidup berdampingan tanpa melebur identitas masing-masing. Hal ini menunjukkan masyarakat bahwa

² Menurut kamus hubungan internasional karya Jack C. Plano dan Roy Olton, hegemoni merupakan perluasan pengaruh atau kekuasaan suatu Negara ke Negara atau kawasan lainnya.

³ Harison, Sinar Harapan, 3 Agustus 2006, *Tanggapan untuk Zainal A. Budiyo: SBY dan Soft Power Diplomacy*.

⁴ Buku Diplomasi Publik Indonesia, www.deplu.go.id

Indonesia adalah masyarakat yang terbuka dan dapat menerima juga menghormati perbedaan. Seperti yang di tunjukkan dalam semangat “Bhineka Tunggal Ika”.⁵

Berbicara mengenai Indonesia tidak bisa lepas dari Soeharto yang telah memimpin negara ini selama hampir empat dekade, dan reformasi yang telah berhasil menjatuhkan rezim tersebut sehingga dapat membawa Indonesia ke arah demokrasi. Penyelenggaraan pemilu secara langsung dan multi partai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1999, kemudian di susul dengan pemilu tahun 2004, merupakan kesuksesan demokratisasi di Indonesia. Tidak hanya dalam politik, demokrasi juga telah merasuk ke setiap unsur kehidupan di Indonesia, termasuk masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang selalu menempatkan penyelesaian konflik secara damai. Sebagai refleksi atas masyarakat yang demokratis, Indonesia mengajukan konsep pembentukan *ASEAN Security Community (ASC)*⁶. Hal ini juga menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia menuju ke arah yang lebih demokratis.

Krisis finansial yang melanda Asia pada pertengahan 1997 turut menyeret ekonomi Indonesia pada ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik. Pada saat krisis terjadi nilai uang jatuh dari Rp 8.000 menjadi sekitar Rp. 17.000 per US dolar. Selain itu, pada tahun 1998 GDP mengalami penurunan sampai 14% dan

⁵ Endang Sri Agustini, “*Indonesia National Identity in Globalization Era: Defining National Identity in A Multicultural Society*”. Makalah yang di presentasikan di UMY dalam International Relations Week 2007, Yogyakarta, 7 Mei 2007.

⁶ ASC atau ASEAN Security Community merupakan sebuah konsep komunitas mengenai pembentukan masyarakat Asia Tenggara untuk menjauhi penggunaan kekerasan atau instrument militer dalam menyelesaikan konflik. ASC menempatkan diplomasi sebagai first liner pertahanan Negara di masa damai. Indonesia adalah Negara yang mengajukan proposal mengenai konsep ini. (lihat Mencai Desian Baru Politik Luar Negeri Indonesia, jurnal CSIS, 2005)

pada tahun 1999 hanya tumbuh 1%. Kemiskinan pun meningkat dari 13% pada 1997 menjadi 27% di akhir 1999.⁷

Saat ini, ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan GDP meningkat dari 3,3% di tahun 2002 mencapai 6,1% di tahun 2008. Walaupun masih terbilang tinggi namun tingkat kemiskinan menurun menjadi 17,8% dari 27% di tahun 2002. Untuk menghadapi tantangan krisis financial global dan kecenderungan menurunnya ekonomi dunia, pemerintah mereformasi sektor finansial, pajak dan bea cukai, pengawasan pasar modal, serta mengenai investasi. Pemulihan dan peningkatan ekonomi Indonesia ini menjadi modal untuk mencitrakan diri sebagai bangsa yang progresif.

Selain pembangun ekonomi, progresif juga bermakna selalu mencari dan memunculkan terobosan-terobosan baru dalam menyelesaikan masalah domestik, regional, dan internasional. Karena itulah aktivitas yang dilakukan oleh Direktorat Diplomasi Publik selalu berusaha untuk menunjukkan citra Indonesia secara progresif, seperti *Interfaith Dialogue* yang merefleksikan Indonesia sebagai bangsa yang moderat, masyarakat yang pluralistik dan toleran, serta negara yang damai dan selalu mengedepankan dialog dan mediasi dalam penyelesaian masalah. Selain itu juga melalui Beasiswa Seni Budaya, dengan tujuan memperkenalkan dan menunjukkan kekayaan seni budaya Indonesia. *Global Intermedia Dialogue*, yang membahas peran media dalam mengembangkan sensitivitas dan toleransi antar budaya dan agama, dan aktivitas lainnya.

⁷ Indonesia Country Strategy Paper 2002-2006, Commission of The European Communities, External Relations Directorate General. Directorate Asia (except Japan and Korea) Policy, Planning and Coordination.

Lebih jauh lagi, untuk membangun dan mengembangkan pendekatan komunikasi, Direktorat Diplomasi Publik mengadakan *People to People Contact* melalui pertukaran budaya, forum untuk anak muda, seminar, workshop, program tv dan radio, malam Indonesia, symposium, dan beberapa aktivitas serupa. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan citra Indonesia guna mempengaruhi publik di dalam dan luar negeri sehingga dapat menguatkan hubungan serta pemahaman mengenai Indonesia yang nantinya dapat menjadi dasar penentu dalam kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara lain.

Upaya diplomasi publik untuk membangun kembali citra negara kemudian mempromosikannya, bukanlah hal yang mudah dan murah. Banyak negara yang pada akhirnya terjebak dalam *nation branding*. Memperlakukan negara seperti sebuah produk yang perlu dipromosikan dengan menyewa biro iklan ternama dan termahal. Kemudian, di tengah globalisasi dimana informasi menjadi cepat menyebar dan mudah di akses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, membuat citra menjadi rentan. Persepsi atas individu atau negara akan dengan mudah ditentukan oleh transaksi informasi. Karena itulah, suatu tantangan bagi diplomasi publik Indonesia untuk lebih kreatif dan inovatif, apalagi banyak negara yang juga berupaya merebut perhatian publik dunia.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan: Apakah diplomasi publik sudah efektif dalam menampilkan wajah Indonesia yang demokratis, moderat, dan progresif?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Kerangka dasar penulisan pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, akan digunakan Definisi Diplomasi Publik, Teori Dua Dimensi Diplomasi Publik dan Model Efektivitas sebagai kerangka dasar pemikiran.

1. Definisi Diplomasi Publik

Istilah diplomasi publik digunakan pertama kali oleh Dean Edmund Gullion dari *Fletcher School of Law Diplomacy*, Universitas Tufts, Amerika Serikat, pada tahun 1965. Dengan definisi:

*“By public diplomacy we understand the means by which governments, private groups and individuals influence the attitudes and opinions of other peoples and governments in such a way as to exercise influence on their foreign policy decisions.”*⁸

“Melalui diplomasi publik, kita memahami maksud yang dilakukan suatu negara, kelompok kepentingan, dan individu dalam bersikap dan beropini dengan seseorang maupun negara lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri negara lain”

Menurut kamus istilah hubungan internasional yang di terbitkan oleh Departemen Luar Negei AS tahun 1987;

“public diplomacy refers to government-sponsored programs intended to inform or influence public opinion in other countries; its chief instrument

⁸ Edward R. Murrow Center for The Study and Advancement of Public Diplomacy, *Difinitions of Public Diplomacy*, The Fletcher School, Tufts University, Massachusetts. (<http://fletcher.tufts.edu/murrow/public-diplomacy.html>)

are publications, motion pictures, cultural exchange, radio and television."⁹

"Diplomasi publik merujuk pada program-program yang di sponsori oleh pemerintah dengan maksud untuk menginformasikan atau mempengaruhi opini publik di negara lain melalui publikasi, film, pertukaran budaya, radio dan televisi sebagai instrumen utama"

2. Teori Dua Dimensi Diplomasi Publik

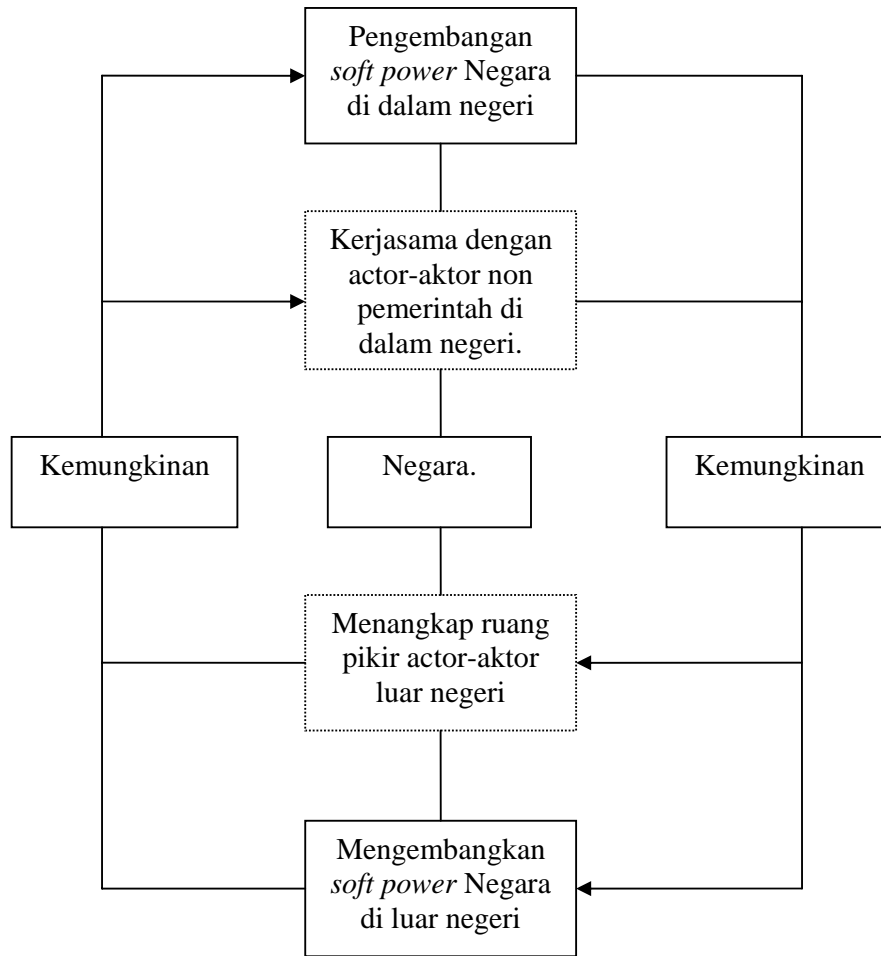
Efektivitas diplomasi publik harus dilihat dari dua dimensi, yaitu bagaimana menganalisa dan memahami cara-cara yang di gunakan dalam mengkomunikasikan apa yang akan di sampaikan ke publik di dalam dan luar negeri. Diplomasi publik meliputi seluruh aktivitas yang di lakukan oleh negara maupun aktor-aktor non negara dalam berkontribusi pada pemeliharaan dan promosi *soft power*.

Soft power Negara di bentuk melalui aktivitas-aktivitas para aktor dan beragam organisasi yang berpengaruh terhadap publik, baik para seniman, galeri-galeri seni dan musik, aktivis masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, politisi, partai dan pakar politik, para penulis dan asosiasi literasi, wartawan dan kelompok media, para pelaku bisnis, perusahaan dan produknya, akademisi dan universitas, pemuka dan kelompok agama, dll.¹⁰

⁹ Public Diplomacy Alumni Association, *What is Public Diplomacy?*.
(<http://www.publicdiplomacy.org/1.htm>)

¹⁰ Josef Batora, "*Multistakeholder Public Diplomacy of Small and Medium-Sized States: Norway and Canada Compared*", makalah yang dipresentasikan dalam International Conference on Multistakeholder Diplomacy, Mediterranean Diplomatic Academy, Malta, 11-13 Februari 2005. (www.diplomacy.edu)

Teori ini dapat dilihat melalui bagan di bawah ini;¹¹



Dari bagan di atas dapat di lihat bahwa strategi diplomasi publik tidak hanya menempatkan negara dalam program-program pengembangan citra yang menarik secara lokal tetapi juga global. Interaksi antara pemerintah dengan berbagai aktor di dalam negeri merupakan hal yang sangat penting dalam diplomasi publik. Selain dapat digunakan untuk meningkatkan *soft power* guna

¹¹ Josef Batora, “*Multistakeholder Public Diplomacy of Small and Medium-Sized States: Norway and Canada Compared*”, makalah yang dipresentasikan dalam International Conference on Multistakeholder Diplomacy, Mediterranean Diplomatic Academy, Malta, 11-13 Februari 2005. (www.diplomacy.edu)

membangun citra, dari interaksi tersebut memungkinkan adanya berbagai kegiatan, aktivitas dan program yang dapat menangkap ruang publik asing. Seiring keberhasilan diplomasi publik, akan terjadi peningkatan interaksi antara pemerintah dan berbagai aktor non negara di dalam dan luar negeri.

Untuk meningkatkan citra negara, strategi diplomasi publik Indonesia yang di jalankan antara lain pemberdayaan kaum moderat, memajukan *people to people contact*, diseminasi informasi mengenai politik luar negeri, merangkul dan mempengaruhi publik dalam dan luar negeri, serta mengumpulkan saran dan masukan bagi pelaksanaan politik luar negeri.

Strategi tersebut diadakan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, organisasi keagamaan, berbagai tokoh, akademisi serta universitas di Indonesia dan luar negeri, LSM, negara-negara ASEAN+3, negara-negara anggota Uni Eropa dan Forum Dialog Pasifik Barat Daya (SwPD), wartawan dan media baik dalam negeri maupun asing, serta berbagai aktor lain yang berkepentingan.

3. Model Efektivitas

Pengertian efektivitas dalam kamus Bahasa Indonesia adalah suatu tahapan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.¹² Digunakan beberapa variabel untuk dapat mengukur maupun mengidentifikasi efektivitas, yaitu¹³;

1. Kemampuan menyesuaikan diri.
2. Kemampuan memperoleh sumber daya dan memanfaatkannya.

¹² Rudi Mulyadi. *Kamus Nasional Kontemporer*. CV. Aneka, Solo. 1994. Hlm.50.

¹³ Richard M Steers. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta. 1985. Hlm.206.

3. Proses komunikasi.

4. Produktivitas

Kemampuan menyesuaikan diri yaitu kemampuan untuk mengubah prosedur standar operasi jika lingkungan berubah, hal ini dilakukan untuk mencegah kebekuan terhadap kondisi lingkungan yang terus berubah dan bersifat dinamis. Diplomasi publik bukanlah hal yang baru, namun untuk menjawab tantangan dunia yang semakin berubah dan dinamis, Departemen Luar Negeri Indonesia membentuk Direktorat Diplomasi Publik pada tahun 2002.

Dengan di bentuknya Direktorat Diplomasi Publik, ada sarana yang dapat menjaga dan mengkoordinasikan pelaksanaan diplomasi publik secara konsisten. Selain itu, penyediaan dana, tenaga, dan materi substansi dapat direncanakan dengan lebih baik dan terarah. Pembentukan ini merupakan suatu upaya menyesuaikan diri dan menjawab tantangan perkembangan dunia, baik secara hubungan internasional, diplomasi, teknologi informasi, globalisasi, maupun isu-isu aktual. Disamping itu juga untuk lebih mengoptimalisasikan diplomasi publik demi mencapai tujuan yaitu, Indonesia yang moderat, demokratis, dan progresif.

Variabel kedua yaitu, kemampuan memperoleh sumber daya dan memanfaatkannya. Diplomasi publik memanfaatkan apa yang sudah dimiliki Indonesia, kemudian memanfaatkannya menjadi kegiatan-kegiatan yang mendukung. Yaitu, keberagaman agama dan budaya yang dikemas dalam kegiatan *Interfaith Dialogue*, *Global Inter-Media Dialogue*, beasiswa Darmasiswa, dan pementasan budaya Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, kebijakan politik luar negeri juga dimanfaatkan melalui seminar,

workshop, dan diskusi. Begitu juga dengan demokratisasi Indonesia. Proses dan pengalaman demokrasi di Indonesia menjadi asset dalam melaksanakan *Bali Democracy Forum*, yaitu forum inter-governmental mengenai demokrasi yang pertama di Asia. Disini dapat dilihat bahwa diplomasi publik mampu memenuhi dua variable efektivitas.

Variable yang ketiga yaitu proses komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam mensosialisasikan eksistensi kepada masyarakat, membangun citra positif dalam rangka memperoleh dukungan, memperoleh opini publik guna membantu perumusan kebijakan, dan membangun jaringan untuk mendukung efektivitas kerja.¹⁴ Proses komunikasi diplomasi publik berupa forum diskusi antara menteri luar negeri dengan para tokoh masyarakat melalui *Foreign Policy Breakfast*. Forum ini sangat bermanfaat dan efektif dalam mengkomunikasikan arah dan kebijakan luar negeri, sekaligus menghimpun masukan dan pendapat yang berkembang di masyarakat. Lebih dari itu, melalui forum ini telah dibangun konstituen-konstituen politik luar negeri di berbagai segmen publik domestik yang terbukti telah mampu mendorong partisipasi publik dalam mendukung upaya-upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah.

Selain itu, untuk mendukung komunikasi publik kini juga telah diterbitkan berbagai buku, majalah dan jurnal sebagai sumber informasi bagi berbagai kalangan masyarakat. Seperti misalnya majalah “Akses” dan “Info Pasar” yang menyampaikan informasi mengenai peluang-peluang pasar di luar negeri kepada kalangan pengusaha. Selain itu juga terbit “Jurnal Luar Negeri” dan “Pejambon 6”

¹⁴ DR Arni Muhammad. *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara. Jakarta, 1995. Hlm.55.

yang bertujuan untuk mendorong diskusi tentang berbagai isu politik luar negeri di kalangan akademisi. Ada pula “Bulletin WTO” yang menyampaikan perkembangan isu-isu perdagangan multilateral dan “IDEAS” mengenai ASEAN.¹⁵

Variable yang terakhir adalah produktivitas. Yaitu, hasil yang dicapai ataupun diperoleh. Dengan kemampuan Direktorat Diplomasi Publik memanfaatkan apa yang dimiliki oleh Indonesia menjadi beragam kegiatan dan aktivitas, serta mengkomunikasikan kepada publik apa tujuan dan hal yang berkaitan dengan diplomasi publik, maka dapat dikatakan bahwa diplomasi publik merupakan institusi yang produktif.

F. Hipotesis

Dari permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka dasar pemikiran yang telah diterapkan, maka hipotesa yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah: diplomasi publik sudah efektif dalam menampilkan wajah Indonesia yang moderat, demokratis, dan progresif. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan diplomasi publik dalam memenuhi empat variabel efektivitas.

G. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu berdasarkan kerangka teori kemudian diambil suatu hipotesis yang akan dibuktikan melalui data yang ada. Pengumpulan data diambil dengan menggunakan metode studi kepustakaan berupa buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, internet, surat kabar serta makalah-makalah yang berhubungan dengan topik-topik yang akan dibahas disini.

¹⁵ *Diplomasi sebagai Public Relation*. Pidato yang disampaikan oleh Sekretaris jendral Luar Negeri, Imron Cotan, pada Workshop Branding Indonesia. Yogyakarta, 18 April 2007. www.deplu.go.id

H. Jangkauan Penulisan

Fokus jangkauan penulisan skripsi ini sejak tahun 2002 dimana pada tahun tersebut Direktorat Diplomasi terbentuk, sampai dengan Desember 2008 karena, sampai dengan saat ini upaya membangun citra Indonesia masih terus dilakukan dengan bekerjasama dan merangkul semua pemangku hubungan luar negeri.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : CITRA NEGARA DAN DINAMIKA DIPLOMASI PUBLIK

INDONESIA

Bab ini berisi tentang peran citra negara dalam hubungan internasional. Disamping itu, juga akan diuraikan berbagai peristiwa yang berdampak terhadap citra Indonesia. Melalui bab ini juga akan diuraikan sejarah diplomasi publik dan perkembangannya. Serta, Direktorat Diplomasi Publik DEPLU sebagai institusi yang berwenang dalam pelaksanaan diplomasi publik Indonesia.

BAB III : PELAKSANAAN DIPLOMASI PUBLIK DALAM MENAMPILKAN

WAJAH INDONESIA YANG MODERAT, DEMOKRATIS, DAN PROGRESIF

Dalam bab ini, akan dibahas rincian aktivitas diplomasi publik mengenai berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam berupaya menampilkan wajah Indonesia yang moderat, demokratis, dan moderat.

BAB IV: PULIHNYA CITRA INDONESIA

Bab ini akan menunjukkan bahwa upaya-upaya diplomasi publik sudah efektif dalam memperbaiki citra Indonesia dan mulai menunjukkan hasilnya. Yaitu berupa peningkatan kunjungan wisata, membaiknya iklim investasi, dan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia.

BAB V : KESIMPULAN

Bab terakhir ini akan menyimpulkan seluruh isi materi penulisan ini yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.